



LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TRIWULAN III TAHUN 2023



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

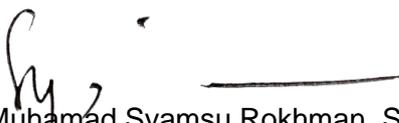
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2023 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan III Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 13 Oktober 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan


Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
NIP. 19830730 200801 1 003

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspectle*, *Internal Process Perspectle*, dan *Learn and Growth Perspectle*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspectle*, *Internal Process Perspectle*, dan *Learn and Growth Perspectle* sedangkan untuk *Stakeholders Perspectle* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2023, Sasaran Strategis UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan

sesuai ketentuan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2023, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 23 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Triwulan III Tahun 2023, dari 23 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 8 (delapan) IKU berwarna hijau (terrealisasi 100%), 1 (satu) IKU berwarna Kuning, IKU berwarna merah tidak ada dan 14 (empat belas) IKU berwarna putih (tidak ada score).

Realisasi anggaran tahun 2023 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 30 September 2023 sebesar **82,96%** atau sebesar Rp **39.232.392.884,-** (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. **47.290.542.000,-** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Ringkasan Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Data Umum Organisasi.....	2
D. Isu Aktual.....	4
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023.....	12
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	15
C. Akuntabilitas Keuangan	61
IV. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2023.....	8
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023	12
Tabel 3. Hasil Pengukuran IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	16
Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Dengan Renstra Tahun 2020-2024	17
Tabel 5. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif	18
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024	19
Tabel 7. Capaian Hari Operasional Kapal Pengawas TW III Tahun 2023	20
Tabel 8. Capaian IKU Indeks Operasional Kapal Pengawas TW III Tahun 2023	20
Tabel 9. Capaian Hari Operasional Speedboat Pengawas TW III Tahun 2023	21
Tabel 10. Capaian IKU Indeks Operasional Speedboat Pengawas TW III Tahun 2023	22
Tabel 11. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	23
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan renstra tahun 2020-2024.....	23
Tabel 13. Capaian IKU Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	24
Tabel 14. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	26
Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	26
Tabel 16. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2022 dan TW III Tahun 2023.....	27
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 18. Pelaku Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023	29
Tabel 19. Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023	30
Tabel 20. Pelaku Usaha Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023.....	30

Tabel 21. Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya TW III Tahun 2023.....	30
Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	38
Tabel 23. Perbandingan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 24. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Penangkapan Ikan	40
Tabel 25. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan TW III Tahun 2023.....	40
Tabel 26. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pembudidaya Ikan.....	42
Tabel 27. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan Tahun 2023.....	42
Tabel 28. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengolahan Ikan	42
Tabel 29. Pelaku Usaha Subsektor Pengolahan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan.....	45
Tabel 30. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan.....	46
Tabel 31. Pelaku Usaha Subsektor Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan.....	46
Tabel 32. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan.....	47
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 34. Capaian IKU pada SK4.2 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	49
Tabel 35. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan Layanan SLO	51
Tabel 36. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024	52
Tabel 37. Pencapaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	53
Tabel 38. Perbandingan IK Ke-11 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024.....	53
Tabel 39. Perbandingan Capaian IK “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024.....	59

Tabel 40. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – September 2023 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen Pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi

Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada **Gambar 1** dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan speedboat Napoleon baru selesai di perbaiki pada bulan September 2023.
- b. Penindakan/pengenaan sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran/kejahatan.
- c. Implementasi Peraturan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 6 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023.

Bab I Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2023.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP NOMOR 23A/ KEP-DJPSDKP/ 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakan melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*); dan
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2023 berjumlah Sasaran Kegiatan (SK) 8 (Delapan) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga). Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN			
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2		2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4. Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		5. Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	6. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	7. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	8. Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP			
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		12. Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		14. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	78
		15. Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		17. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		18. Jumlah inovasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	92
		20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	77,5
		21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	77,5
		22. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89
		23. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 23 (dua puluh tiga) IKU. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW III	REALISASI TW III	PERSENTASE
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN						
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	0	0	0
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	87,6	99,77	113,81%
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	87,6	78,66	89,79%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4. Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	0	0	0
		5. Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	0	0	0
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN						
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	6. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup	100	100	100	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW III	REALISASI TW III	PERSENTASE
		Stasiun PSDKP Belawan (%)				
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN						
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	7. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	8. Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	70	100	120%
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	0	0	0
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP						
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	88,92	111,15%
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80	80	90,37	112,96%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW III	REALISASI TW III	PERSENTASE
		12. Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75	0	0	0
		13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
		14. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	78	0	0	0
		15. Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	90	0	0	0
		16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	0	0	0
		17. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21	0	0	0
		18. Jumlah inovasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	0	0	0
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	92	92	101,85	110,71%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW III	REALISASI TW III	PERSENTASE
		20. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	77,5	0	0	0
		21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	77,5	0	0	0
		22. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	89	0	0	0
		23. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82	0	0	0

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor \geq 100)
2		Hati-hati ($80 \leq$ Skor $<$ 100)
3		Buruk (Skor $<$ 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Triwulan III Tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas”**. Target Indeks kualitas pembinaan

Pokmaswas sebesar 80% dan ditetapkan sebagai target semesteran. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Indikator ini menjadi target semesteran yaitu 50 dan tahunan yaitu 80.

Pembinaan POKMASWAS bertujuan untuk pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas pada tahun TW III tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW III tahun 2022 karena beda IKU. Capaian IKU ke-1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas”, dapat dilihat pada **Tabel 3** berikut.

Tabel 3. Hasil Pengukuran IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Triwulan III 2023		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU1	2023 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	-	-	-
	2022 : Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87	-	-	-

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 4** berikut :

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2022 : Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	87	-	-
2023 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	-	-	-	-	80	80

Sampai dengan 30 September 2023 belum ada realisasi anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 0%.

Pelaksanaan tugas dalam upaya pengawasan Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan Oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan berkoordinasi dengan Sesditjen PSDKP hal Narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pokmaswas. Pelaksanaan tugas pengawasan Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang

dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian SK 1.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: IKU Ke-2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas dan IKU Ke-3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas. Adapun capaian dari SK1.2 dapat dilihat pada **Tabel 5** sebagai berikut.

Tabel 5. Capaian Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2022	Capaian TW III Tahun 2022	Target TW III Tahun 2023	Capaian TW III Tahun 2023
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	87.6	99,77
2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	-	-	87.6	78,66

Capaian IKU ini pada TW III Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada TW III Tahun 2022 karena pada tahun 2022 IKU ini dinilai pada TW II dan TW IV. Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada SK 1.2 ini karena hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan hari operasi kapal pengawas yang baik.
2. Terlaksananya perawatan kapal pengawas dengan baik sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
3. Monitoring terhadap kegiatan dan penyelesaian laporan kegiatan dilaksanakan dengan baik.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 6** berikut.

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif Dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
2021 : Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	-	-	0,78	1,8	-	-	-
2021 : Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	0,028	0,11	-	-	-
2022 - 2023 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,6	-	-	-	87,5	87,6	87,6
2022 - 2023 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87,6	-	-	-	87,5	87,6	87,6

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.595.731.000 dan sampai dengan 30 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp.19.249.823.829 atau sebesar 93,47%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar 19,67%.Penjelasan masing-masing IKU pada SK1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

a. IKU Ke-2 Indeks Kinerja Operasi kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku *IUU Fishing*;

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan patroli oleh 3 (tiga) unit kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu KP Hiu 01, KP Hiu 08 dan KP Hiu 16. Selama TW III Tahun 2023 KP Hiu 01, KP Hiu 08 dan KP Hiu 16 telah melaksanakan hari operasi dengan rata-rata 8,78 Hari Operasi. Capaian Hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 7** berikut.

Tabel 7. Capaian Hari Operasional Kapal Pengawas TW III Tahun 2023

Bulan	Kapal Pengawas		
	Hiu 01	Hiu 08	Hiu 16
Juli	0	7	0
Agustus	20	7	15
September	15	7	8

Dengan perencanaan dan pelaksanaan hari operasional kapal pengawas yang terlaksana dengan baik, maka pada TW III Tahun 2023 capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas tercapai sebesar 99,77 dari target 87,6. Capaian IKU pada TW III Tahun 2023 ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW III Tahun 2022, karena pada tahun 2022, IKU ini dilakukan perhitungan pada TW II dan TW IV. Capaian indeks operasional kapal pengawas dapat dilihat pada **Tabel 8** berikut.

Tabel 8. Capaian IKU Indeks Operasional Kapal Pengawas TW III Tahun 2023

--

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dialokasikan sebesar Rp. 20.257.978.000,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu) dengan realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp. 19.175.439.829 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu

Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 94,66%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 94,66%.

b. IKU Ke-3 Indeks Kinerja Operasi *SpeedBoat* Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan patroli oleh 2 (dua) unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Dolphin 014 dan Napoleon 028. Dukungan armada speedboat ini bertambah dari armada speedboat pada TW I dan TW II karena repowering speedboat Napoleon 028 telah selesai dikerjakan pada bulan September 2023. Selama TW III Tahun 2023 Speedboat 014 dan Napoleon 028 telah melaksanakan hari operasi dengan rata-rata 4 hari operasi. Capaian Hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 9** berikut.

Tabel 9. Capaian Hari Operasional Speedboat Pengawas TW III Tahun 2023

Bulan	Dolphin 014	Speedboat 028
Juli	3	0
Agustus	0	0
September	0	5
Total	3	5

Pada TW III Tahun 2023 capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas tercapai sebesar 78,66 dari target 87,6. Tidak tercapainya target Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas ini karena factor pembagi rata-rata hari operasi bertambah dari 1 speedboat menjadi 2 speedboat karena telah selesainya repowering Napoleon 028 pada bulan September 2023 dan hari operasi speedboat tersebut belum bisa maksimal. Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas pada TW III Tahun 2023 ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian IKU pada TW III Tahun 2022, karena pada tahun 2022, IKU ini dilakukan perhitungan pada TW II dan TW IV. Capaian indeks operasional kapal pengawas dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian IKU Indeks Operasional Speedboat Pengawas TW III Tahun 2023

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dialokasikan sebesar Rp. 337.753.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sampai dengan 30 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp.74.384.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 22,02%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini belum tercapai dengan realisasi anggaran masih sebesar 22,02%.

3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK1.3 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU Ke-4 “Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** dan **IKU Ke-5 “Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP”**.

Adapun capaian dari SK1.3 dapat dilihat pada **Tabel 11** sebagai berikut.

Tabel 11. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

No	Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2022	Capaian TW III Tahun 2022	Target TW III Tahun 2023	Capaian TW III Tahun 2023
1	Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	-	-	-	-
2	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP	-	-	-	-

Pada TW III Tahun 2023, capaian ini belum dapat dihitung dan belum memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2022, capaian IKU ini sama-sama belum memiliki capaian. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2022-2024. IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 12** berikut :

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	-	-	-	-	100	-
Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	-	100	100	100	100	100

Penjelasan Pencapaian IKU dari SK1.3 sebagai berikut.

a. IKU Ke-4 Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Dalam rangka pencapaian IKU 4 “Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) data dukung yaitu: Renovasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU Ke-4 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
	TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN
<i>Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan</i>	100%	0	0

Persentase penyelesaian pembangunan bangunan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah jumlah Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP yang selesai dibangun dibandingkan dengan target kegiatan pembangunan Sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Sarana Pengawasan yang akan di bangun Stasiun PSDKP Belawan adalah Renovasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian pembangunan sebesar 100%. Pada TW III Tahun 2023 IKU Ke-4 belum dapat dihitung dan memiliki capaian, IKU ini akan tercapai pada TW IV tahun 2023 dengan target capaian 100%.

IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan bangunan Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.763.730.049,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribuan Empat Puluh Sembilan Rupiah) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.025.000.000,- (Enam Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

b. IKU Ke-5 Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dimiliki Stasiun PSDKP Belawan meliputi: 3 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit *Speedboat* Pengawas.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictle maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada TW III Tahun 2023 IKU Ke-5 belum ada capaian karena IKU ini dilakukan perhitungan pada TW IV Tahun 2023. Capaian iku pada TW III Tahun 2023 ini sama bila dibandingkan dengan capaian pada tahun TW III Tahun 2023 yaitu belum ada realisasi.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.4.356.784.017 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Belas Rupiah) atau 90,21% dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.829.558.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU belum tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 90,21%.

4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-6 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Ukuran keberhasilan IKU Ke-6 ini diperoleh dari capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Untuk mengukur capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	0,10	SPT, Surat pemberitahuan, daftar pertanyaan
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada TW III tahun 2023 IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan presentase 100%. Capaian pada TW III sama dengan yang ditargetkan pada TW III Tahun 2023 yaitu 100% dengan persentase capaiannya sebesar 100%. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-6 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya.
3. Untuk peningkatan Kompetensi telah diselenggarakan Bimtek.

Pencapaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III tahun 2023 sama dengan capaian TW III tahun 2022 dengan capaian sebesar 100%. Capaian IKU ke-6 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja	Target TW III Tahun 2023	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase (%)	Capaian TW III Tahun 2022	Persentase (%)
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Dilihat dari sisi jumlah pelaku usaha kelautan yang di periksa kepatuhannya, capaian pada TW III Tahun 2023 sebanyak 14 pelaku usaha. Capaian ini lebih besar bila dibandingkan dengan capaian TW III Tahun 2022, dimana pada TW III tahun 2022 yang diperiksa sebanyak 8 pelaku usaha. Perbandingan capaian pelaku usaha kelautan yang di periksa pada TW III Tahun 2023 dibandingkan dengan TW III Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2022 dan TW III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW III Tahun 2022	Realisasi TW III Tahun 2023
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	1
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	6
3	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	3
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	6	4
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		8	14

IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 17** berikut :

Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	16 pelaku usaha.	95	100	100	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	-	-	-	-	100	100

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 245.347.000 dan sampai dengan 30 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp.107.051.793,- atau 43,63%. Capaian ini terhitung belum efisiensi dikarenakan capaian target pada TW III Tahun 2023 telah tercapai dengan penggunaan anggaran masih 43,63%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Unit Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Adapun capaian pengawasan unit usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 yaitu 1 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 sebagaimana **Tabel 18** dibawah ini:

Tabel 18. Pelaku Usaha Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan nya
Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
CV. Cahaya Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini beralamat di Jln. P. Nusa Barung Komp. Niaga Malindo No. 3A Kawasan Industri Medan 1, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; - CV. Cahaya Sejahtera memiliki SIPJI untuk sirip hiu dan pari appendiks II cites; - Perusahaan ini telah memiliki kuota ekspor jenis ikan dilindungi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.1370/DJPRL.5/PRL.430/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 sebanyak 4.731,42 Kg sirip, 5.000 Kg daging, 6.149,23 kulit pari dan hiu; - Sirip ikan hiu diperoleh pengambilan dari alam yang berasal dari Sibolga, Belawan, dan Aceh; - Tujuan pemasaran ekspor yaitu Hongkong; - Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa perizinan lengkap, lokasi usaha sesuai, Jenis Kegiatan pemanfaatan telah sesuai, Jenis dan Jumlah sirip ikan hiu yang dimanfaatkan sesuai sehingga pelaksanaan kegiatan usaha telah memenuhi ketentuan dan peraturan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 92.841.692,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 46,49% dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 199.697.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar 46,49%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh),

Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

b. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 yaitu 6 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 sebagaimana **Tabel 19** dibawah ini:

Tabel 199. Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
CV. Pantai Bali Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Pantai Bali Lestari beralamat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara; - CV. Pantai Bali Lestari di Kelola oleh Kelompok Objek Wisata Pantai Bali Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8547/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Objek Wisata Pantai Bali Lestari Seluas + 25 (Dua Puluh Lima) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 14 (Empat Belas) Hektare dan Hutan Lindung (HP) Seluas ± 11 (Sebelas) Hektare di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.; - CV. Pantai Bali Lestari juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha Nomor 8120110261482 tanggal 18 Desember 2018 untuk Karaoke, taman rekreasi/ Taman Wisata dan Nomor Induk Berusaha Nomor 8120017271199 tanggal 19 Desember 2018 untuk Restoran dan Warung Makan;

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ditemukan adanya pemanfaatan ruang laut dan akan ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K.
Pantai Woong Rame	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Woong Rame berada di Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara; - Pantai Woong Rame telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Kota Medan tanggal 23 Juni 2021; - Pantai Woong Rame telah memiliki NIB nomor 1201000662533 tanggal 23 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal; - Luas area sebesar 15 Ha dengan titik koordinat 98°58' 14" BT dan 3° 39'30" LU; - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ditemukan adanya pemanfaatan ruang laut dan akan ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K.
Pantai Pondok Permai	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Pondok Permai berada di Dusun III, Kelurahan Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, Prov.Sumatera Utara; - Pantai Pondok Permai memiliki Perjanjian Kerjasama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Tanjung Beringin dengan UD Pondok Permai tentang Penggunaan Perairan untuk Bangunan dan Kegiatan No.ISU.004/1/3/UPP.TB- 2019 tanggal 10 Juni 2019; - Pantai Woong Rame telah memiliki NIB nomor 9120209542316 tanggal 21 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; - Luas area sebesar 13 Ha dengan titik koordinat 3° 39' 21" LU dan 98° 58' 39" BT; - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ditemukan adanya pemanfaatan ruang laut dan akan ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K.
Pantai Theme Park	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Theme Park berada di Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara - Theme Park & Ressor memiliki NIB yang diterbitkan oleh OSS dengan Nomor 8120010160014 yang terbit tanggal 01 November 2023. - Theme Park & Ressor memiliki luas lahan 33 Ha dengan kondisi eksisting 27 Ha. - Izin Pengelolaan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 08 Agustus 2002

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ditemukan adanya pemanfaatan ruang laut dan akan ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K.
Pantai Putra Deli	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Putra Deli berada di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang - Pantai Putra Deli memiliki izin pengelolaan Pantai Wisata Putra Deli Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Pantai Labu dengan nomor : 08/2013/032/2015 dan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang No.1939 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)"Pantai Indah Karya Putra Deli Dusun II Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu dengan jumlah anggota 36 orang - Jenis kegiatan sesuai pengawasan berupa rumah makan, mangrove dan Tracking Spot Foto - Luas area sebesar 18 Ha dengan Titik koordinat 3°40'7440"N 98°54'9870"E - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ditemukan adanya pemanfaatan ruang laut dan akan ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K.
Pantai Cemara Kembar	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Cemara Kembar berada di Jalan ATP No. 15, Desa Sei Nagalawan, Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Prov.Sumatera Utara Utara; - Pantai Cemara Kembar telah memiliki izin Pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8916/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2018 ; - Luas area sebesar 3,58 Ha dengan titik koordinat 3° 35' 49" LU dan 99° 05' 04" BT; - Dari Kegiatan Pengawasan Wisata Bahari ditemukan adanya pemanfaatan ruang laut dan akan ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 92.841.692,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 46,49% dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 199.697.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis

terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar 46,49%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

c. Pengawasan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya

Adapun capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 yaitu 3 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 sebagaimana **Tabel 20** dibawah ini:

Tabel 20. Pelaku Usaha Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Belawan TW III Tahun 2023

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha yang diawasi adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah memiliki dokumen PKKPRIL nomor memiliki dokumen persetujuan konfirmasi KKPRL absah dengan nomor: 17122110511200001 tanggal 16 Desember 2021 terkait: interkoneksi Kabel Laut 20kV Pulau Sumatera-Pulau Sembilan. Panjang kabel laut adalah 0,75 km (nol koma tujuh lima kilometer) dengan kedalaman 15 meter; - PT. PLN telah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2022;

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - PT. PLN sudah menyampaikan laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi sebagaimana kewajiban PLN yang dituangkan pada lampiran KKPRL; - Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh PLN pada kegiatan Interkoneksi Kabel Laut 20kV Pulau Sumatera-Pulau Sembilan sudah memiliki dokumen Persetujuan/KKPRL yang absah dan dilakukan dilokasi yang sesuai peruntukannya; - Polsus PWP3K tidak menemukan adanya pelanggaran.
EMP Gebang Ltd	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor EMP Gebang Ltd. yang berlokasi di Kab. Langkat, Sumatera Utara; - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan Nomor: 11012210511200001 yang diterbitkan a.n Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 6 Januari 2022; - Adapun Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ialah 35115 dengan detail kegiatan usaha: Pengembangan Lapangan Migas Secanggang; - Luas lapangan migas yang akan dikembangkan adalah 4,84 Ha ; - Pihak EMP Gebang Ltd yaitu bpk Ronny Lilipaly selaku "Operation and Support Coordinator" menginformasikan bahwa lapangan migas akan dibangun di Dusun Biru, Desa Bubun, Kec. Secanggang, Kab. Langkat. Pengerjaan lapangan migas ini belum berjalan dikarenakan AMDAL belum terbit, akan tetapi sudah masuk di dalam peta rencana zonasi pemerintah daerah Sumatera Utara. Polsus PWP3K melakukan pengawasan langsung ke lokasi dan ditemukan belum ada aktifitas di lokasi tersebut; - Polsus PWP3K menyarankan agar EMP Gebang Ltd segera merealisasikan izin PKKPRL.
PT. Multimas Nabati Asahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha yang diawasi adalah PT. Multimas Nabati Asahan yang telah memiliki dokumen PKKPRL absah dengan nomor: 24112210511200005 yang diterbitkan oleh

NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 24 Nopember 2022 dengan kegiatan usaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;" - Perusahaan juga sudah memiliki SK Kelayakan Lingkungan Industri dari Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44/349/KPTS/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dari Dirjen Perhubungan Laut Nomor BX-520/PP.008 tanggal 27 Desember 2018; - Perusahaan ini sudah menyampaikan laporan kegiatan usaha yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Laut pada tanggal 25 Agustus 2023; - Polsus WP3-K melakukan pemeriksaan kesesuaian koordinat PKKPRL dan diperoleh hasil bahwa TUKS yang dibangun dan dioperasikan telah sesuai dengan koordinat yang ditentukan pada PKKPRL. Jetty ini dibangun pada tahun 1998 - 2000. - Polsus PWP3K tidak menemukan adanya pelanggaran.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 92.841.692,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 46,49% dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 199.697.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar 46,49%.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau).

Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

d. Pengawasan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak Pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yang diperiksa kepatuhannya pada TW III tahun 2023 yaitu 4 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana **Tabel 21** dibawah ini:

Tabel 21. Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya TW III Tahun 2023

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Mitra Laut Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Mitra Laut Abadi terletak di Jln. Pulau Buton Kawasan Industri Medan 2, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang industri pembekuan ikan dan perdagangan besar hasil perikanan; - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 8120216151849 tanggal 14 November 2018 dan sudah memiliki izin lingkungan; - Pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan.
PT. Toba Surimi Industries	<ul style="list-style-type: none"> - PT Toba Surimi Industries berada di Jalan Pulau Pinang KIM II dan Jalan Pulau Sumatera KIM I, Kota Medan; - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang industri pembekuan, pengalengan, dan perdagangan besar hasil perikanan - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 8120101920359 tanggal 14 April 2022 perubahan ke 45 dan telah memiliki UKL-UPL; - Pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan.

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
PT. Red Ribbon Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Red Ribbon Indonesia terletak di Kawasan Industri Medan I (KIM I) K.L. Yos Sudarso KM 10,5 KIM I, Kota Medan, Provinsi Sumatera; - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang industri pembekuan ikan dan perdagangan besar hasil perikanan; - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 8120004872553 tanggal 6 Mei 2023 perubahan ke -27; - Pengolahan air limbah dilakukan secara terpadu di PT. Kawasan Industri Medan.
PT. Suritani Pemuka	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Suri Tani Pemuka yang berlokasi di Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara - Perusahaan ini termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang industri pembekuan ikan; - Perusahaan ini memiliki NIB nomor 8120001702648 tanggal 17 Mei 2023 perubahan ke-94 dan sudah memiliki izin lingkungan; - PT. Suri Tani Pemuka memiliki IPAL mandiri.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.14.210.101,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Seratus Satu Rupiah) atau 31,13% dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 45.650.000,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pelaksanaan tugas pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang. Untuk melakukan kegiatan pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

5. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-7 “Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III tahun 2023 tercapai 100% sesuai yang ditargetkan pada TW III tahun 2023 sebesar 100%. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-1 sebagai berikut:

1. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi;
2. Dilaksanakannya rapat bulanan yang bertujuan untuk menyusun rencana pengawasan pada bulan tersebut dan mengevaluasi kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya;
3. Untuk peningkatan Kopetensi diselenggarakan Bimtek.

Capaian IKU ini sama bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW III tahun 2022 dengan capaian sebesar 100%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian IKU ke-7 Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana pada **Tabel 22** berikut.

Tabel 20. Hasil Pengukuran IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian TW III Tahun 2023	Persentase (%)	Capaian TW III Tahun 2022	Persentase (%)
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan

Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 23** berikut :

Tabel 21. Perbandingan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2023	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	-	-	-	-	100	100

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dan sampai dengan 30 September 2023 telah terealisasi sebesar Rp.285.088.840 atau sebesar 43,86%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian pada Sub IKU ini sudah tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan masih sebesar 43,86%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) pemeriksaan kepatuhan subsektor perikanan, antara lain: (1) Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan, (2) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan, (3) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan, (4) Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan. Untuk Pembahasan capaian kepatuhan subsektor perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Presentase penyelesaian

pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

Tabel 22. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Penangkapan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Adapun capaian pelaku usaha subsektor penangkapan ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) yang dilakukan pada periode Triwulan III tahun 2023 sebanyak 7 unit usaha. Capaian pada TW III tahun 2023 ini lebih kecil bila di bandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2022 dengan capaian 13 pelaku usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan BBESWSWSSdi lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2023 sebagaimana **Tabel 25** dibawah ini:

Tabel 23. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan TW III Tahun 2023

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Tondi Haryono	- Usaha Penangkapan milik Bapak Tondi Haryono dengan NIB 8120102801606 - Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 70 %, dalam kategori Baik

NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
Bapak Dafid	Usaha Penangkapan milik Bapak Dafid dengan NIB 8120110142726 Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 85%, dalam kategori Baik
Bapak Acu Budi	Usaha Penangkapan milik Bapak Acu Budi dengan NIB 8120203870065 Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 75%, dalam kategori Baik
Tondi Maryono	Usaha Penangkapan milik Tondi Maryono dengan NIB 8120215062454 Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 75%, dalam kategori Baik
PT Berombang Perkasa	Usaha Penangkapan milik PT Berombang Perkasa dengan NIB 9120508873206 Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 97%, dalam kategori Baik Sekali
Dedy Suhendra	Usaha Penangkapan milik Dedy Suhendra dengan NIB 3112210008417 Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 82%, dalam kategori Baik Sekali
Gunawan	Usaha Penangkapan milik Gunawan dengan NIB 8120104763314 Nilai kepatuhan pelaku usaha adalah 73%, dalam kategori Baik Sekali

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

b. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pembudidayaan Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pembudidayaan

ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut.

Tabel 246. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pembudidaya Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pada TW III tahun 2023 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengawasan budidaya kepada 10 pelaku usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III Tahun 2023 sebagaimana **Tabel 27** dibawah ini:

Tabel 257. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan Tahun 2023

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
1	Suri Tani Pemuka, PT	Pembenihan Ikan Laut (03212)	Nilai Kepatuhan 100% (Baik Sekali)
2	Zulmahdi	Pembesaran Crustacea Air Payau (03254)	Nilai Kepatuhan 75% (Baik)
3	Suri Tani Pemuka Unit Hatchery, PT. cq. Nugraha Panca	Pembenihan Ikan Air Tawar (03226)	Nilai Kepatuhan 0% (Kurang baik)
4	Suri Tani Pemuka Unit Tilapia Grow Out, PT. cq.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba	Nilai Kepatuhan 100 % (Baik Sekali)

	Nugraha Panca	Jaring Apung (03222)	
5	UPR Tunas Muda Mandiri / Ariadi	Pembenihan Ikan Air Tawar (03226)	Nilai Kepatuhan 58% (Baik)
6	UPR SRT Berjaya / Ahmad Sobirin Hasibuan	Pembenihan Ikan Air Tawar (03226)	Nilai Kepatuhan 64% (Baik)
7	PT. AquaFarm	Pembenihan Ikan Air Tawar (03226)	Nilai Kepatuhan 100% (Baik Sekali)
8	Pokdakan Sukaramai	Pembesaran ikan air tawar di kolam (KBLI 03221)	Nilai Kepatuhan 69.3% (Baik)
9	Nur Efendi	Pembesaran ikan air tawar di kolam (KBLI 03221)	Nilai Kepatuhan 62,25% (Baik)
10	PT Expravet Nasuba	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Nilai Kepatuhan 70 % (Baik)
		Pembenihan Ikan Air Tawar	Nilai Kepatuhan 50 %

Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

c. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan

dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengolahan ikan sebagai berikut.

Tabel 28. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengolahan Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala mikro, menengah dan besar. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang pengeksport produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Unit usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada periode Triwulan III tahun 2023 sebanyak 5 unit usaha UPI. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III Tahun 2023 sebagaimana **Tabel 29** dibawah ini.

Tabel 26. Pelaku Usaha Subsektor Pengolahan Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
1	Aiyub Itam	10211	Pelaku usaha mendapatkan Nilai Kepatuhan 73,3 %
2	Nurhasni	10219	Nilai kepatuhan pada saat dilakukan kegiatan yaitu 92,5% (Sangat Baik);
3	Achmad Buchari Muslim	10213	Nilai Kepatuhan Teknis pelaku usaha perdagangan besar hasil perikanan 98,33% (Baik Sekali)
4	PT Mutiara Laut Abadi	10293	Nilai Kepatuhan Pada saat dilakukan kegiatan yaitu 100% (Sangat Baik)
5	UD.Pakaina	10219	Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha 70 %

Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2023 sebesar 100%, capaian pada TW III tahun 2023 ini telah sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra yaitu 100%. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

d. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Nilai capaian kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan ini diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Kategorisasi penyelesaian pemeriksaan KBLI subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan sebagai berikut:

Tabel 3027. Tahapan Pemeriksaan Dilakukan Oleh Pengawas Perikanan Terhadap Pemeriksaan 1 (Satu) KBLI Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSPD)
Jumlah Nilai		1	

Unit usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada periode Triwulan III tahun 2023 sebanyak 6 unit usaha. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan di lingkup Stasiun PSDKP TW III tahun 2023 sebagaimana **Tabel 31**.

Tabel 31. Pelaku Usaha Subsektor Pengangkutan Dan Pemasaran Ikan Yang Telah Sesuai Dengan Kriteria/Tahapan Pemeriksaan

No	Nama Pelaku Usaha	KBLI	Hasil Pengawasan
1	PT Bahari Makmur Sejati	10293	Nilai kriteria pemeriksaan teknis ialah sebesar 93 % (baik sekali)
2	PT. Suri Tani Pemuka	46206	Nilai kriteria pemeriksaan teknis ialah sebesar 97,92 % (baik sekali)
3	PT. Inlif Jaya Samudera	46206	Perusahaan Tidak Beroperasi
4	PT. Sorby International Medan	46206	Nilai kriteria pemeriksaan teknis ialah sebesar 91,75 % (baik sekali)
5	PT Mutiara Laut Abadi	46206	Nilai kriteria pemeriksaan teknis ialah sebesar 98,75 % (baik sekali)
6	CV.King Milk Fish	46206	nilai kepatuhan teknis pelaku usaha 80% (baik sekali)

Apabila dibandingkan dengan target Renstra serta target pada Perjanjian Kinerja periode Tahun 2023 sebesar 100%, capaian pada Triwulan III tahun 2023 ini telah

sesuai dengan rincian target kinerja serta target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan probabilitas pencapaian target akhir tahun dapat tercapai.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas pengawasan Pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Pelaku usaha subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) provinsi: Satwas PSDKP Langsa (Prov. Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimaksud.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-8 “Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Adapun Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan sebagaimana **Tabel 32** berikut.

Tabel 28. Capaian IKU pada SK4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE
1	Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan	70%	100%	120%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE
	dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)			

Penjelasan pencapaian IKU dari SK4.1 sebagai berikut:

a. IKU Ke-8 Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Pada TW III tahun 2023 IKU Ke-8 Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan tercapai 100% dari Target 70%. Tercapainya target pada IKU ke-8 tersebut dikarenakan :

1. Terlaksananya pengawasan bidang kelautan dan perikanan di Stasiun PSDKP Belawan dengan baik.
2. Peningkatan pemahaman dari pengawas perikanan dengan mengikuti Bimtek yang di adakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.
3. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan instansi terkait lainnya.

Capaian IKU Ke-8 pada TW III Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun 2022, karena pada tahun 2022, IKU ini dilakukan pengukuran pada TW IV Tahun 2022. IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada renstra 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU dengan Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2023	2023	2024
Persentase Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	-	-	0	0	93	93	93

Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80	-	-	-	-	80	80
---	----	---	---	---	---	----	----

Anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Efektifitas peneanaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi sebesar Rp. 45.265.757,- atau 45,27% dari total anggaran Rp. 100.000.000,- .

7. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas

Dalam rangka pencapaian SK4.2 “Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU Ke-9 “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**. Adapun Capaian IKU pada SK4.2 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sebagaimana **Tabel 34** berikut.

Tabel 304. Capaian IKU pada SK4.2 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		
		TARGET TW III	CAPAIAN TW III	PERSENTASE
1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0%	0%	0%

Penjelasan pencapaian IKU dari SK4.2 sebagai berikut:

a. IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Pada TW III Tahun 2023 IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan

dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum ada capaian, karena IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan perhitungan pada TW III Tahun 2023.

Untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 441.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.187.688.757,- atau 42,50%.

- 8. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP**
- Dalam rangka pencapaian SK5.1 “Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) IK. IK tersebut terdiri dari: **(1) IK Ke-10 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (2) IK Ke-11 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (3) IK Ke-12 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (4) IK Ke-13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) ; (5) IK Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks); (6) IK Ke-15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (7) IK Ke-16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) ; (8) IK Ke-17 Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai); (9) IK Ke-18 Jumlah inovasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi); (10) IK Ke-19 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (11) IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (12) IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%); (13) IK Ke-22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup**

Stasiun PSDKP Belawan (%) (nilai); (14) IK Ke-23 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai).

Penjelasan Pencapaian masing-masing IK dari SK5.1 sebagai berikut:

a. IK Ke-10 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-10 "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan " merupakan kegiatan pengumpulan data dan Informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Capaian IKU Ke-10 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2023 tercapai 88,92 dari target yang telah ditetapkan pada TW III tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 111,15%. Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Lingkup Stasiun PSDKP Belawan" karena telah dilaksanakan pelayanan penerbitan SLO oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan prima. Hal tersebut berimplikasi langsung karena telah dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terkait performa pelayanan publik Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu triwulanan. Berdasarkan tingginya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat berimplikasi pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan TW III tahun 2022 terdapat peningkatan capaian sebesar 0,5 karena capaian Pada TW III tahun 2022 IKU ke-10 ini sebesar 88,42. Peningkatan capaian dari tahun 2022 disebabkan karena penggunaan aplikasi terbaru dalam pelayanan SLO telah berjalan dengan lancar dan baik sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha atau stakeholder. Nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan Layanan SLO

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,685
2	Sistem. Mekanisme, Prosedur	3,691
3	Waktu Penyelesaian	3,500
4	Biaya/Tarif	3,654
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,463

6	Kompetensi Pelaksana	3,463
7	Perilaku Pelaksana	3,506
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,549
9	Sarana dan Prasarana	3,500

IK tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Perbandingan capaian IK tersebut dengan target renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36. Perbandingan Capaian IK dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	-	0	80	80	80	80

b. IK Ke-11 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-11 "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan" merupakan kegiatan pengumpulan data dan Informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Capaian IK Ke-11 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2023 tercapai 90,37 dari target yang telah ditetapkan pada TW III tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 112,96%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Apabila dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2023 IKU ke-11 mengalami penurunan sebesar 1,1 dari indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI TW III Tahun 2022. Pencapaian IK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Pencapaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,533
2	Sistem. Mekanisme, Prosedur	3,600
3	Waktu Penyelesaian	3,533
4	Biaya/Tarif	3,600
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,667
6	Kompetensi Pelaksana	3,600
7	Perilaku Pelaksana	3,667
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,800
9	Sarana dan Prasarana	3,533

Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan pelayanan penerbitan LVHPI oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan prima. Hal tersebut berimplikasi langsung karena telah dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terkait performa pelayanan publik Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu triwulanan. Berdasarkan tingginya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat berimplikasi pada capaian target kinerja dapat terpenuhi. IK tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Perbandingan capaian IK tersebut dengan target renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 318. Perbandingan IK Ke-11 dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2023	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	-	0	80	80	80	80

c. IK Ke-12 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Triwulan III 2023			Target 2024
Kode	Uraian		Target	Capaian	%	
IK12	Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan	75	-	-	-	75

Target Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan tahun 2023 adalah 75 dan menjadi target tahunan. Tercapainya target ini dikarenakan sistem reformasi birokrasi di Stasiun PSDKP Belawan berjalan dengan baik serta adanya pendampingan dari Sekretariat Ditjen. PSDKP mengenai pemenuhan dan kualitas dokumen WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN- KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Pagu anggaran untuk pembangunan zona integritas (ZI) sebesar Rp. 100.091.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.653.539 atau 29,63%.

d. IK Ke-13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Triwulan III 2023			Target 2024
Kode	Uraian		Target	Capaian	%	
IK13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100,00	100

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan mendapat target 100% dan tercapai. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap

akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

e. IK Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Triwulan III 2023			Target 2024
Kode	Uraian		Target	Capaian	%	
IK14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan	78	-	-	-	78

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatifitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2022 adalah 78 dan ditetapkan sebagai target semesteran. Hal ini dikarenakan pegawai Stasiun PSDKP Belawan semakin banyak yang mengikuti pelatihan dan bimtek sehingga memperoleh sertifikat. Selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dan sudah aktif kembali.

Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu (1) Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, (2)Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), (3) Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan (4) Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

f. IK Ke-15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2023 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro perencanaan KKP. Pengukuran capaian indicator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu: 1) kepatuhan; 2) Aspek Kesesuaian; 3) Aspek ketercapaian; dan 4) Aspek Ketepatan.

Pada TW III Tahun 2023 IK Ke-15 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” belum memiliki capaian karena IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan pada TW IV Tahun 2023.

g. IK Ke-16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Triwulan III 2023			Target 2024
Kode	Uraian		Target	Capaian	%	
IK16	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	0	0	0	80

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 75%. Pada TW III Tahun 2023 IK Ke-16 “Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” belum memiliki capaian karena IK Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dilakukan pada TW II dan TW IV Tahun 2023.

h. IK Ke-17.Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen. PSDKP dengan target 21 per triwulan, yang diperoleh dari: (1) Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker; (2) Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE

Pelaksanaan Program Budaya Kerja. IK Ke-17 ini akan dilakukan pengukuran pada TW IV dengan target yang ditetapkan 21.

i. IK Ke-18 Jumlah inovasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-18 Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, kriteria baik bersifat manual/mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Perhitungan jumlah inovasi diperoleh melalui perumusan inovasi dari 5 (lima) Satuan Kerja Pusat. **Setiap Satuan Kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi.** Tahun 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Capaian dari IK Ke-18 “Jumlah inovasi yang dihasilkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dilakukan pengukuran pada TW IV Tahun 2023 .

j. IK Ke-19 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 86% pertriwulan pada tahun 2023. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW III sebesar 101,85 melebihi dari target yang di tetapkan pada TW III yaitu sebesar 92%. Tercapainya target pada IK ini karena seluruh peserta yang di daftarkan pada aplikasi bitrix ini aktif melakukan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan melalui aplikasi bitrix.

Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa: Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IK pada TW III tahun 2022, IK Ke-19 ini mengalami kenaikan capaian sebesar 2,96% bila dibandingkan dengan capaian TW III tahun 2022 sebesar 98,89%. Capaian IK Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar berikut.

CAPAIAN NILAI MP DITJEN PSDKP TRIWULAN III TAHUN 2023

Target 92%.

SATKER PUSAT

UNIT	TW 1	TW 2	TW 3*	Nilai Rata-rata Tahun 2023
SETDITJEN	97.78%	98.06%	105.90%	100.58%
DIT POA	100.00%	100%	128%	109.45%
DIT PPSDP	100.00%	95.00%	87.15%	94.05%
DIT PPSDK	98.98%	100.00%	108.33%	102.44%
DIT PP	100.00%	99.17%	91.38%	96.85%

Ket: *)Nilai yang diinput ke KINERJAKU

SATKER UPT PSDKP

UNIT	TW 1	TW 2	TW 3*	Nilai Rata-rata Tahun 2023
JAKARTA	100.00%	92.59%	100.00%	97.53%
BITUNG	100.00%	92.59%	100.00%	97.53%
LAMPULO	92.59%	92.59%	102.78%	96.73%
BATAM	100.00%	92.59%	94.44%	95.68%
BENOA	85.19%	100.00%	105.56%	96.92%
TUAL	91.11%	99.26%	116.67%	102.35%
BELAWAN	85.19%	100.00%	101.85%	95.68%
PONTIANAK	97.04%	98.52%	93.52%	96.36%
TARAKAN	100.00%	94.07%	100.00%	98.02%
CILACAP	80.74%	100.00%	107.41%	96.05%
KUPANG	73.33%	92.59%	122.22%	96.05%
AMBON	82.22%	100.00%	94.44%	92.22%
TAHUNA	98.52%	100.00%	122.22%	106.91%
BIAK	91.11%	100.00%	96.30%	95.80%

Gambar 2. Capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen Pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Keberhasilan untuk mencapai IKU ini di dukung oleh kelengkapan dokumen kinerja dan keaktifan dari pegawai untuk menyampaikan data, informasi dan kegiatan yang dilaksanakan di Stasiun PSDKP Belawan pada aplikasi Bitrix24.com. Dalam hal peningkatan persentase penerapan sistem manajemen kinerja pengetahuan yang terstandar pada periode berikutnya dilakukan perbaikan terhadap penyampaian data, informasi dan kegiatan agar dapat dilakukan secara *real-time*.

Perbandingan capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 39** berikut:

Tabel 39. Perbandingan Capaian IK “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2023	2023	2024
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	86	-	82	84	86	92	92

k. IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian kinerja untuk IK Ke-20 pada periode TW III tahun 2023 belum dapat diukur/dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2023 dengan target nilai 75%.

l. IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IK Ke-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian kinerja untuk IK Ke-21 pada periode TW III tahun 2022 belum dapat diukur/dihitung, Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV tahun 2022 dengan target nilai 75%.

m. IK Ke-22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (Delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III Tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran. IK ke-22 bila dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2022 sama karena pada TW III Tahun 2022 juga tidak dilakukan pengukuran. IK Ke-22 akan dilakukan pengukuran pada tiap semester, dengan target yang ditetapkan pada Semester I sebesar 82% dan Semester II sebesar 89 pada tahun 2023.

n. IK Ke-23 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2023 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). IK ke-23 pada periode TW III tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran. Bila dibandingkan dengan capaian IK pada TW III tahun 2022, capaian IK ini sama karena IK ini sama-sama dilakukan pengukuran pada TW IV. IK ini akan diukur kinerjanya pada TW IV tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA – 032.05.2.440831/2023 tanggal 14 Desember 2022 dan telah di kurangi dengan anggaran yang di Automatic Adjustment (AA), Stasiun PSDKP Belawan mendapat alokasi dana sebesar **Rp.47.290.542.000,-** (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi anggaran sampai 30 September 2023 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai sebesar **Rp 39.232.392.884,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta

Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau 82,96%. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 40** berikut.

Tabel 32. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – September 2023

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	32.937.236.000	28.950.767.285	87,90
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	491.600.000	188.288.757.	38,30
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	245.347.000	107.051.793	43,63
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	650.000.000	285.088.840	43,86
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	14.353.306.000	10.281.625.599	71,63
TOTAL		47.290.542.000	39.232.392.884	82,96

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada TW III Tahun 2023 Nilai NPSS Stasiun PSDKP Belawan sebesar 106,25% .
2. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2023 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (triwulan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
5. Melaksanakan perbaikan speedboat Napoleon 028 pada tahun 2023.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan melakukan monitoring dan rapat bulanan Triwulanan.
4. Mengajukan anggaran perbaikan speedboat Napoleon 028 pada pagu indikatif anggaran Tahun 2023.